



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1206 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL ALAMANDA TOWER YANG
TERLETAK DI JALAN TB. SIMATUPANG KAV. 23-24/JALAN PANGERAN ANTASARI
KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa PT Karyadeka Graha Lestari telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Alamanda Tower yang terletak di Jalan TB. Simatupang Kav. 23-24/ Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Direktur PT Karyadeka Graha Lestari tanggal 5 Maret 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur berwenang mengesahkan pertelaan rumah susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Alamanda Tower yang Terletak di Jalan TB. Simatupang Kav. 23-24/Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Akta Pemisahan Rumah Susun;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOMPOKAN PERTELEAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL ALAMANDA TOWER YANG TERLETAK DI JALAN TB. SIMATUPANG KAV. 23-24/JALAN PANGERAN ANTASARI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Alamanda Tower yang terletak di Jalan TB. Simatupang Kav. 23-24/Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, yang aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (*as build drawing*) serta

- KEEMPAT : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Komersial Alamanda Tower.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Direktur PT Karyadeka Graha Lestari